



Dana Cair Setelah Ketemu Gubernur

Tahap Pertama Rp 10 Miliar

DENPASAR – Pertemuan Bawaslu Bali dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Selasa (17/10) lalu membawa hasil manis bagi Bawaslu Bali. Kemarin (18/10), dana pengawasan Pilkada 2018 langsung cair. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, menyatakan dana pengawasan sudah dua bulan tidak cair. Bahkan, Panwas kabupaten/kota harus merogoh kocek sendiri untuk biaya operasional. Praktis, mereka juga tidak menerima honor.

“Anggaran pengawasan Pilgub Bali sudah cair hari ini (kemarin, Red). Tahap pertama cair Rp 10 miliar,” ujar Rudia kepada *Jawa Pos Radar Bali*. Pencairan tahap dua sebesar Rp 17 miliar dianggarkan pada APBD perubahan 2017. Sementara sisanya dicairkan APBD induk 2018. Total dana pengawasan pilkada yang akan diterima Bawaslu Rp 62 miliar lebih.

Mantan wartawan itu tak menampik jika permasalahan anggaran disampaikan kepada gubernur. Rudia menyampaikan dana pengawasan tidak cair menghambat kinerja Bawaslu. “Sudah saya sampaikan dan Pak Gubernur sudah jawab. Gubernur tidak ada menghambat, karena masalah pencairan itu teknis. Memang ada miskomunikasi sedikit tapi usai menghadap langsung kami urus,” imbuhnya.

Menurut Rudia, gubernur meminta Bawaslu berani, tegas dan keras menegakkan aturan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2018. “Tegakkan



TEMUI GUBERNUR: Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menemui Gubernur Pastika, Selasa (17/10) lalu. Usai pertemuan, itu kemarin dana pengawasan Pilkada 2018 langsung cair.

aturan, jangan terpengaruh tekanan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, jangan ragu menegakkan aturan,” ucap Rudia menirukan Pastika.

Dijelaskan Rudia, gubernur berpesan kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga pelaksana pemilu merupakan bagian dari pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai sebuah

pesta demokrasi. Pastika juga menyinggung pelaksanaan pilkada dalam situasi siaga darurat Gunung Agung. Pemprov Bali telah melakukan langkah antisipasi yaitu dengan mendata pengungsi dari 28 desa yang masuk zona rawan.

Menurut Pastika, database itu akan memudahkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memetakan jumlah pengungsi yang punya hak pilih. Melalui

sinergi semua pihak, Pastika berharap Bali bisa menjadi contoh perhelatan demokrasi yang bersih. Menanggapi arahan Pastika, Rudia meyakinkan kalau jajarannya akan komit mengawal dan menegakkan aturan pelaksanaan Pilkada 2018. Dalam kesempatan itu, Rudia juga melaporkan kesiapan jajarannya dalam mengawal perhelatan Pilkada serentak. (san/dot)

Edisi : Rabu, 18 Oktober 2017

Hal : 5



Dana Cair Setelah Ketemu Gubernur

Tahap Pertama Rp 10 Miliar

DENPASAR - Pertemuan Bawaslu Bali dengan Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Selasa (17/10) lalu membawa hasil manis bagi Bawaslu Bali. Kemarin (18/10), dana pengawasan Pilkada 2018 langsung cair. Sebelumnya, Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, menyatakan dana pengawasan sudah dua bulan tidak cair. Bahkan, Panwas kabupaten/kota harus merogoh kocek sendiri untuk biaya operasional. Praktis, mereka juga tidak menerima honor.

"Anggaran pengawasan Pilgub Bali sudah cair hari ini (kemarin, Red). Tahap pertama cair Rp 10 miliar," ujar Rudia kepada *Jawa Pos Radar Bali*. Pencairan tahap dua sebesar Rp 17 miliar dianggarkan pada APBD perubahan 2017. Sementara sisanya dicairkan APBD induk 2018. Total dana pengawasan pilkada yang akan diterima Bawaslu Rp 62 miliar lebih.

Mantan wartawan itu tak menampik jika permasalahan anggaran disampaikan kepada gubernur. Rudia menyampaikan dana pengawasan tidak cair menghambat kinerja Bawaslu. "Sudah saya sampaikan dan Pak Gubernur sudah jawab. Gubernur tidak ada menghambat, karena masalah pencairan itu teknis. Memang ada miskomunikasi sedikit tapi usai menghadap langsung kami urus," imbuhnya.

Menurut Rudia, gubernur meminta Bawaslu berani, tegas dan keras menegakkan aturan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2018. "Tegakkan



TEMUI GUBERNUR: Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menemui Gubernur Pastika, Selasa (17/10) lalu. Usai pertemuan, itu kemarin dana pengawasan Pilkada 2018 langsung cair.

aturan, jangan terpengaruh tekanan dari kiri maupun kanan. Kalau memang ada pelanggaran dan harus didiskualifikasi, jangan ragu menegakkan aturan," ucap Rudia menirukan Pastika.

Dijelaskan Rudia, gubernur berpesan kinerja yang ditunjukkan oleh lembaga pelaksana pemilu merupakan bagian dari pertanggungjawaban setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membiayai sebuah

pesta demokrasi. Pastika juga menyinggung pelaksanaan pilkada dalam situasi siaga darurat Gunung Agung. Pemprov Bali telah melakukan langkah antisipasi yaitu dengan mendata pengungsi dari 28 desa yang masuk zona rawan.

Menurut Pastika, database itu akan memudahkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memetakan jumlah pengungsi yang punya hak pilih. Melalui

sinergi semua pihak, Pastika berharap Bali bisa menjadi contoh perhelatan demokrasi yang bersih. Menanggapi arahan Pastika, Rudia meyakinkan kalau jajarannya akan komit mengawal dan menegakkan aturan pelaksanaan Pilkada 2018. Dalam kesempatan itu, Rudia juga melaporkan kesiapan jajarannya dalam mengawal perhelatan Pilkada serentak. (san/dot)

Edisi : Rabu, 18 Oktober 2017

Hal : 5



Pangkas Dana BOS 75 Persen

■ Salurkan ke Sekolah Penampung Siswa Pengungsi ■ Usulkan Beasiswa untuk 22.041 Pelajar

AMLAPURA, TRIBUN BALI - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Karangasem merencanakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialihkan sementara. Dana BOS akan disalurkan ke sekolah-sekolah yang menampung siswa pengungsi Gunung Agung.

Sekretaris Disdikpora Karangasem, Wayan Sutrisna, Selasa (17/10) mengatakan, Keputusan ini diambil sesuai surat edaran dari Dirjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Saat ini, tercatat 22.041 siswa SD dan SMP di Karangasem yang mengungsi.

Menurut surat edaran tersebut, dari anggaran 100 persen, 25 persen dana BOS akan diberikan ke sekolah induk untuk administrasi laporan. Sementara 75 persen sisanya untuk sekolah yang menampung pengungsi.

"Para siswa pengungsi berasal dari 141 SD dan SMP yang ada di lima kecamatan, yakni Rendang, Kubu, Bebandem, Selat, dan Abang," ujarnya.

Selain itu, 22.041 siswa yang mengungsi rencananya akan diberikan beasiswa serta sarana prasarana sekolah seperti buku, pensil, tas, dan pralatan tulis lainnya. Namun ini masih sebatas rencana yang diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Beasiswa yang diberikan nanti berupa uang. Namun Sutrisna belum mengetahui berapa jumlahnya. Usulan barang berupa alat tulis dan tenda akan digunakan untuk posko sekolah darurat. Sementara jenset, lampu, serta barang lain untuk aktivitas belajar siswa di pengungsian.

"Sehingga para siswa merasa nyaman dan tenang mengikuti pelajaran. Pemberian beasiswa dan alat tulis masih usulan, belum terealisasi. Surat usulan sudah dilayangkan sepekan lalu, sekaligus proposalnya. Disetujui atau tidak, kami belum tahu," kata Sutrisna.

Rencana ini, kata dia, hanya menyoal siswa SD dan SMP. Sementara untuk siswa SMA/SMK, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.

Bantuan beasiswa dan fasilitas untuk siswa yang mengungsi dianggarkan di Pos Tangap Darurat Kementerian Pendidikan sesuai Permendikbud. Harapannya agar usulan tersebut terealisasi sehingga siswa bisa mendapat uang saku untuk bekal sekolah.

"Selain usulkan beasiswa dan alat tulis, pemerintah juga usulkan permainan untuk anak-anak untuk menghibur di posko pengungsian. Relawan juga sudah siap mengajari anak-anak," imbuhnya. (ful)